

TEORI PENEMUAN HUKUM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Josef M Monteiro*

* Hukum Tata Negara, Dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Nusa Cendana Kupang NTT
Email korespondensi: josefmonteiro@ymail.com

Info Naskah:

Diterima	Direvisi	Disetujui
20 Oktober 2017	2 Desember 2017	15 Februari 2018

Abstrak

Analisis konseptual yang bersifat yuridis normatif ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimanakah Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan teori penemuan hukum berupa: (a) penafsiran konteks, non sistematis, dan futuristik sebagai langkah progresif dalam menguji undang-undang, dan (b) penafsiran sosiologis atau teleologis dan heuristik untuk keabsahan MK menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Melalui penggunaan teori penemuan hukum, mengakibatkan konstitusi dapat ditegakan secara efektif dan menjamin nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan untuk masa kini dan pada waktu mendatang

Keywords: *penemuan hukum, penafsiran, pengujian*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kewenangan MK, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;

Berdasarkan ketentuan tersebut, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan MK kemudian dirinci dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

- (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

- (3) memutus pembubaran partai politik

- (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK hingga saat ini telah melaksanakan tiga kewenangannya, yaitu memutus pengujian undang-undang atas UUD NRI Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pula perselisihan pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, melalui putusannya tertanggal 19 Mei 2014, kemudian MK menegaskan tidak berwenang menangani kasus pemilihan kepala daerah. MK mengacu pada tafsir “*original intent*” atas Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah tidak masuk dalam kategori ‘rezim pemilu’ yang dilaksanakan lima tahun sekali.¹ Dibandingkan dengan kewenangan lain yang dimiliki oleh MK, pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 termasuk yang paling dominasi. Akan tetapi, jika dicermati dari beberapa putusan pengujian undang-undang oleh MK, ada yang berdimensi teori atau ajaran penemuan hukum (*rechtsvinding*), artinya MK telah mengintrodusir teori penemuan hukum sebagai metode dalam membuat putusannya.

Selain itu, MK juga menggunakan pendekatan teori penemuan hukum untuk keabsahan kewenangannya dalam menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu). Meski tidak ada satu pun pasal yang mengatur kewenangan MK menguji Perpu, akan tetapi sejak tahun 2009 MK telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian konstitusionalitas Perpu. Bahkan pada Juli 2017 MK telah pula menerima permohonan pengujian konstitusionalitas Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang diajukan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah dibubarkan oleh pemerintah, dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya juga mengajukan uji materi Perpu tersebut. Setidaknya menurut pendapatnya, penerbitan Perpu tidak tepat karena tidak didasarkan pada syaratsituasi darurat yaitu: (1) kebutuhan mendesak; (2) kekosongan hukum karena Undang-Undang tidak ada atau memadai; dan (3) kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan undang-undang. Selain itu, soal kandungan substansi Perpu yang mengancam kebebasan berserikat, meniadakan proses hukum pembekuan atau pembubaran organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya Perpu menambah dan melanggengkan pasal karet “penistaan agama” dan memperbesar sanksi pidana

¹ Harian Umum Kompas, 26 Mei 2014

kepada tertuduh “penoda agama” dan “separatisme”.²

2. Rumusan Masalah

Tulisan ini adalah analisis konseptual dan kajiannya bersifat yuridis normatif. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah penggunaan teori penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian Undang-Undang dan pengujian konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang? dan bagaimanakah pula akibat hukumnya?

B. TEORI PENEMUAN HUKUM

Penemuan hukum oleh hakim pada dasarnya merupakan suatu proses yang logis belaka melalui subsumsi dari fakta pada ketentuan undang-undang, akan tetapi adalah juga penilai dari fakta untuk kemudian menemukan hukumnya. Undang-undang itu tidak selalu jelas, tidak selalu lengkap, sedangkan fakta yang diajukan memerlukan penyelesaian menurut hukum. Jika interpretasi, penerapan undang-undang baik secara ekstensif (luas, *pen*) maupun secara restriksi (sempit, *pen*) tidak mampu memberi sesuatu penyelesaian maka untuk menemukan hukumnya, faktalah yang

harus dinilai.³ Sehubungan dengan hal tersebut, penemuan hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) teori, yaitu: penafsiran menurut ilmu hukum dan penafsiran menurut metodenya. Menurut ilmu hukum dikenal 4 (empat) macam penafsiran, yaitu:⁴

1) Penafsiran subyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai kehendak pembentuknya seperti ketika peraturan itu ditetapkan.

2) Penafsiran obyektif, merupakan kebalikan dari penafsiran subyektif. Dalam penafsiran obyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.

3) Penafsiran restriktif atau penafsiran secara sempit, peraturan perundang-undangan diberikan arti terbatas menurut bunyi peraturan tersebut. Pada cabang Hukum Pidana, menurut Van Hattum, penafsiran ini disebut penafsiran yang bersifat “*strict*”. Ia menegaskan ‘dalam jangka waktu yang lama, orang masih tetap bertahan bahwa undang-undang pidana harus ditafsirkan terbatas menurut bunyi undang-

²<https://katadata.com>

³ John Z. Loudoe, 1985, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta: Bina Aksara, hal. v

⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum*, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10 April 1996, hal. 7

undang itu sendiri”.⁵ Dalam Hukum Administrasi, penafsiran restriktif biasanya digunakan dalam menafsirkan mengenai tunjangan anak, sebagai “anak kandung”, dan bukanlah mencakup “anak luar kawin”.

4) Penafsiran ekstensif atau penafsiran secara luas, peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan memberi arti lebih luas daripada apa yang tersurat. Contoh klasik penggunaan penafsiran ekstensif adalah dalam kasus pencurian aliran listrik. Di negeri Belanda, sebelum penafsiran ini diterapkan oleh Mahkamah Agung (*Hogeraad*, selanjutnya disingkat HR), pengambilan listrik secara tidak sah, tidak dapat dikualifikasikan sebagai “pencurian”, karena itu tidak dapat dipidana. Baru sejak HR dalam putusannya yang terkenal dengan nama *electrisiteit arrest*, tanggal 23 Mei 1921, dengan menggunakan penafsiran ekstensif, istilah “barang” eks Pasal 362 KUHP ditafsir termasuk meliputi aliran listrik. Atas dasar penafsiran itu, HR menyatakan pengambilan aliran listrik secara tidak sah adalah perbuatan pidana, dan pencurinya dapat dihukum.

Sedangkan dari segi metode, penafsiran hukum terdiri atas:⁶

a. Penafsiran gramatika (tata bahasa), yaitu mencari makna suatu ketentuan hukum dari kata-katanya menurut pemakaian bahasa sehari-hari dan/atau pemakaian secara teknis yuridis. Penafsiran ini merupakan sarana tertua yang dimiliki para ahli hukum (yuris) untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan.

b. Penafsiran historis, dibedakan atas penafsiran sejarah hukum (*rechtshistoriesinterpretatie*) dan penafsiran sejarah undang-undang (*wetshistoriesinterpretatie*). Dalam hal penafsiran sejarah hukum, hakim mencari makna atau arti aturan hukum dari perkembangan suatu lembaga hukum (figur hukum). Misalnya, untuk memahami kompetensi relatif dan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara,⁷ maka ditelusuri melalui sejarah peradilan administrasi yang pada mulanya berkembang dalam Hukum Administrasi Perancis. Di Perancis, segala pelanggaran hukum administrasi diserahkan dan diselesaikan oleh suatu peradilan khusus yaitu *tribunaux administratifs*. Peradilan bandingnya yang merupakan peradilan terakhir adalah wewenang Council d’Etat. Putusan-putusan badan peradilan administrasi tertinggi ini merupakan sumber

⁵ P.A.F. Lamintang, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hal. 44

⁶ I Dewa Gede Atmadja, *Op.cit*, hal. 9

⁷ Benyamin Mangkoedilaga, 1988, *Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Angkasa, hal. 25-26

hukum terpenting dalam hukum administrasi Prancis.⁸ Dalam hal penafsiran sejarah undang-undang, hakim mencari makna atau arti suatu ketentuan UU dengan menelusuri riwayat pembentukan UU tersebut. Sejarah UU dapat dipelajari dari risalah UU, Perdebatan-perdebatan di dalam sidang DPR, jawaban dan keterangan eksekutif, serta dengar pendapat umum.

c. Penafsiran sistematis, adalah menentukan makna atau arti satu pasal peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada pasal-pasal lainnya dalam kerangka keseluruhan peraturan atau tata hukum yang berlaku. Contoh penggunaan penafsiran sistematis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada makna Pasal 6 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1). Menurut penafsiran secara sistematis ini Pasal 6 ayat (1) mengandung makna sebagai aturan hukum yang bersifat *exception* (pengecualian) terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), sehingga syarat “Presiden harus orang Indonesia asli” tidak bertentangan dengan HAM.

d. Penafsiran sosiologis atau teleologis, yakni hakim memberi arti suatu ketentuan

hukum menurut tujuan sosial yang ditetapkan pembentuk UU, dengan memperhatikan perkembangan masyarakat ketika UU itu diterapkan. Perlu diketahui bahwa tujuan pembentuk UU identik dengan tujuan UU, tetapi berbeda dengan tujuan hukum. Hal ini tujuan hukum sifatnya umum dan ditentukan oleh doktrin hukum. Gustav Radbruch (1950) berpendapat bahwa tujuan hukum yang harus dikemas oleh hakim dalam mengadili adalah: (1) keadilan, (2) kepastian hukum, dan (3) kegunaan atau utilitas. Masing-masing bersandar pada dotrin filosofis, yuridis, dan historis – sosiologis mengenai validitas hukum. Tujuan UU sifatnya khusus, dalam arti setiap UU mempunyai tujuan dan politik perundang-undangan sendiri. Tujuan UU dapat diketahui dari latar belakang dan proses pembentukannya serta penjelasan UU (*memorie van tot lichting*).

Selain itu, PWC Akkermans menegaskan bahwa untuk menghindari ketidakadilan dalam menafsirkan makna aturan hukum, sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan 5 (lima) faktor⁹:

1) Faktor wewenang, artinya badan yang menyusun peraturan perundang-undangan itu memang diberi wewenang secara konstitusional

⁸ Kuntjoro Purbopranoto, *Dasar-Dasar Hubungan Warga negara dengan Pemerintah*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1960, hal. 4

⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Op.cit*, hal. 10

2) Faktor substansi, artinya materi muatan peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan lingkup kewenangan yang diaturnya

3) Faktor heuristik, artinya peraturan perundang-undangan itu telah mengakomodasikan perkembangan segi-segi sosial dan psikologi masyarakat

4) Faktor konstitusional, artinya materi muatan atau isi peraturan perundang-undangan itu tidak menyimpang dari hierarki peraturan perundang-undangan

5) Faktor prosedural, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu telah dipenuhi prosedur pembahasan menurut ketentuan hukum

Melalui penafsiran-penafsiran tersebut diatas, ilmu hukum dan praktek hukum mengisyaratkan bahwa hakim kini sudah tidak dapat lagi berpegang pada peraturan perundang-undangan secara kaku dalam penerapan hukum. Hakim juga dituntut untuk memperhatikan segi heuristik yakni perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam proses kemajuan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Malahan ilmu hukum dan praktek hukum telah pula memperkenalkan metode penafsiran yang relatif baru, yakni penafsiran antisipatif (*anticiperende interpretatie*). Metode penafsiran antisipatif

dipergunakan untuk menyelesaikan isu-isu hukum berdasarkan gagasan-gagasan yang masih berupa RUU yang sedang dibahas di DPR, guna menjawab tantangan masa depan. Dikalangan ilmuwan dalam rangka mengantisipasi kemajuan iptek, globalisasi atau era “kesejagatan” penafsiran ini lebih dikenal dengan istilah penafsiran futuristik. Oleh karena itu Abdoel Gani, menyatakan pentingnya asas-asas futuristik dalam rangka menyusun konstruksi-konstruksi guna penegakan hukum demi menegakan keadilan.¹⁰ Kemudian terdapat juga penafsiran hukum lainnya, yaitu:

1. Penafsiran Teks dan Konteks

Hukum dapat ditafsirkan secara teks dan konteks. Penafsiran secara teks adalah penafsiran terhadap konstitusi tanpa memandang makna yang tersirat dari konstitusi tersebut, sedangkan penafsiran secara konteks adalah memahami konstitusi secara tersirat bukan secara lahiriah, dengan kata lain bahwa ada suatu makna yang terkandung di dalamnya.¹¹

¹⁰ Abdoel Gani, *Pidato Promotor*, pada peresmian penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum kepada Drs. Moerdiono di Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 6

¹¹ Mhd. Shiddiq Tgk, Armia, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 90

2. Penafsiran Non-Sistematik

Penafsiran non-sistematik dalam kaitannya dengan hukum, memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:¹² *pertama*, harus mampu menghasilkan tafsir yang mengarahkan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. *Kedua*, penafsiran hukum bersifat temporal. Disini artinya penafsiran hukum berorientasi sosial. Penafsiran tidak diarahkan kepada pencarian makna universal, tetapi diarahkan untuk memberi gambaran tertentu bagi suatu generasi tertentu. Penafsiran ini tidak berurusan dengan masa lalu atau masa datang, tetapi dikaitkan dengan realitas kontemporer di mana ia muncul. *Ketiga*, penafsiran juga bersifat atau berkarakter realistik, yakni memulai penafsiran dari realitas kehidupan dengan segala problematikanya dan bukan tafsir yang tercerabut dari realitas sosial.

C. TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG

1. Putusan Pengujian Undang-Undang

Sejak MK dibentuk Agustus 2003 hingga sekarang terdapat perkembangan yang menarik sehubungan dengan fenomena

banyaknya perkara pengujian undang-undang yang dimohonkan ke MK. Keadaan ini sedikitnya menunjukkan tiga hal penting: *pertama*, muncul kesadaran konstitusional di kalangan warga negara Indonesia tentang hak-hak konstitusional mereka yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan MK dengan kewenangannya menguji undang-undang telah memberi akses bagi warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka.¹³ *Kedua*, banyak undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undang serta mencederai hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Inilah yang kemudian mendorong pihak-pihak yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK.¹⁴ *Ketiga*, menurut Yuliandri, “banyaknya permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke MK, merupakan salah satu bukti bahwa pembentukan undang-undang belum sepenuhnya mewujudkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik”. Akibatnya, “terkesan MK merupakan tempat untuk menampung

¹² Anthon F. Susanto, *Op.cit*, hal. 264

¹³ Munafrizal Manan, 2012, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Mandar Maju, hal. 5

¹⁴ *Ibid*

pelbagai kelemahan yang dimiliki undang-undang.”¹⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam perkembangannya MK telah membuat kreasi putusan atas perkara pengujian undang-undang yakni menggunakan pendekatan teori atau ajaran penemuan hukum. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang berdimensi penemuan hukum telah menghasilkan tiga jenis putusan, yaitu:¹⁶ *pertama*, penyimpangan ketentuan undang-undang, *kedua*, menunda tidak mengikatnya undang-undang, dan *tiga*, konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).

Berikut ini diketengahkan salah satu contoh penggunaan pendekatan penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, yang menghasilkan putusan berupa menunda tidak mengikatnya undang-undang. Untuk memahaminya, perlu dicermati isi pertimbangan hukum yang ada dalam putusan. Hal ini penting sebab menurut Peter Mahmud Marzuki, jika mempelajari suatu putusan pengadilan, maka yang disoroti adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu

pertimbangan pengadilan atau alasan hukum yang dikemukakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Dalam konteks Indonesia yang menganut *Civil Law System*, *ratio decidendi* tersebut ditemukan di bagian konsideran “Menimbang” pada “Pokok Perkara” dalam putusan pengadilan.¹⁷

Kasus yang diangkat adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal pengujian Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.¹⁸ MK mengintrodusir penemuan hukum dalam bentuk menunda tidak mengikatnya undang-undang. Pada pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, mengabulkan permohonan Pemohon terhadap pengujian Pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, MK berpendapat pada intinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah suatu pengadilan khusus, meskipun Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menyebut demikian.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat disebut sebagai pengadilan khusus karena khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

¹⁵ Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 9 dan 242

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dalam Munafrizal, *Op.cit*, hal . 60

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, cetakan keenam, hal. 94, 119, dan 121

¹⁸ Lihat Munafrizal, *Op.cit*, hal. 81-83

susunan majelis hakim terdiri dari dua orang hakim peradilan umum dan tiga orang hakim *ad hoc*, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi harus selesai dalam jangka waktu 90 hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan (*vide* Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). MK berpendapat, sebagai sebuah pengadilan khusus, seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur oleh sebuah undang-undang khusus sebagaimana dengan pengadilan-pengadilan khusus lainnya yang telah ada, sehingga tidak dicantolkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

MK juga berpendapat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan kekhususan yang dimilikinya tersebut menimbulkan adanya dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama. Dalam praktik yang terjadi selama ini, ternyata terjadi standar ganda dalam upaya pemberantasan korupsi oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, semua Hakim Konstitusi berpendapat ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1), dan (2), Pasal 24A Ayat (5), dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Namun, amar Putusan MK menyatakan Pasal 53 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun sejak putusan diucapkan pada tanggal 19 Desember 2006.

Dalam pertimbangan hukumnya untuk menunda pembatalan kekuatan hukum Pasal 53, MK mengemukakan empat hal berikut: *pertama*, akibat hukum atas kekuatan mengikat Pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut harus cukup mempertimbangkan agar proses peradilan Tindak Pidana Korupsi atas pemeriksaan perkara yang sedang ditangani tidak terganggu atau tidak macet, apalagi menimbulkan kekacauan hukum. *Kedua*, putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi jangan sampai menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. *Ketiga*, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jangan sampai pula menimbulkan implikasi melemahnya semangat pemberantasan korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa dan masyarakat Indonesia. *Keempat*, untuk melakukan penyempurnaan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penataan kelembagaan pengadilan khusus yang diperlukan untuk itu,

tidak dapat diselesaikan sengketa sehingga dibutuhkan waktu yang cukup.

Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.” Namun, menurut pertimbangan hukum MK dalam putusannya tersebut, ketentuan seperti ini hanya merupakan aturan umum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas suatu undang-undang. Untuk kepentingan umum yang jauh lebih besar, MK merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas suatu undang-undang. Untuk itu, MK merasa perlu mengambil sikap kearifan dan kenegarawanan (*judicial wisdom and craftsmanship*), yaitu dengan memberikan jangka waktu paling lama tiga tahun untuk menyelaraskan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan tindak pidana korupsi. Jika dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sendirinya demi hukum

memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, dan seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Meskipun putusan MK tersebut bagi sebagian kalangan dinilai sebagai suatu langkah progresif, akan tetapi bagi kalangan lainnya menilai secara kontra atas putusan hakim yang berdimensi penemuan hukum. Mereka beranggapan bahwa hakim MK yang membuat putusan dengan menggunakan cara penemuan hukum, telah melampaui batas kewenangannya, bahkan putusan tersebut sering mengandung *ultra petita*,¹⁹ sehingga mengarah pada intervensi ke ranah legislatif.²⁰ Pada dasarnya ketentuan *ultra petita* tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Polemik *ultra petita* ini dipersoalkan seperti pada putusan yang telah diuraikan di atas, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal pengujian Pasal 53 Undang-

¹⁹Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatihan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang diminta

²⁰Josef M Monteiro, 2013, *Catatan Hukum Kekuasaan versus Supremasi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 20

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.

Menurut kalangan yang mempersoalkan *ultra petita*, meskipun dalam permohonan tidak diminta, akan tetapi MK memutuskan menanggukuhkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan. Sementara pada Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan penafsiran *a contrario* maka seharusnya setelah dinyatakan bertentangan, undang-undang tidak memiliki kekuatan berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, *ultra petita* menjadi kontroversial di masyarakat, sehingga advokat Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa “Arah kedua tentang berrbagai keputusan Mahkamah Konstitusi yang *ultra petita* dan *extra kontroversial* menjadi pertanyaan siapa yang berhak melakukan koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang begitu arogan dan ambisius, melanggar doktrin dan tradisi hukum bahwa pengadilan di mana pun dalam sistem negara hukum yang

demokratis adalah tabu memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta ataupun dituntut, kecuali atas dasar-dasar hukum, moral, dan etika.”²¹

Terlepas dari polemik putusan MK yang *ultra petita* tersebut, menurut penulis, penggunaan teori penemuan hukum berupa penafsiran hukum tetap merupakan suatu langkah progresif dalam menguji undang-undang. Setidaknya terdapat beberapa alasan, yakni:

(1) Melalui penafsiran konteks; hakim MK memahami konstitusi secara tersirat dan bukannya secara lahiriah. Artinya ada makna yang terkandung di dalam konstitusi yang harus digali oleh hakim MK. Disinilah hakim MK mengamalkan sprit hakim yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalil hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara

²¹ Adnan Buyung Nasution, “Quo Vadis Hukum dan Peradilan di Indonesia,” Kompas, 22 Desember 2006

(*rechtsweigerung*). Oleh karena itu, apabila hakim MK tidak menemukan hukumnya secara tersurat dalam konstitusi, maka hakim MK wajib mencari makna secara tersirat di dalam konstitusi. Melalui pendekatan seperti itu, hakim MK memerhatikan realitas perkembangan nilai-nilai konsitusi dalam kehidupan masyarakat. Seringkali akibat dari dinamisasi kehidupan masyarakat, maka konstitusi tidak bisa semata-mata dimaknai secara tekstual. Untuk itu, perlu terobosan hukum yakni menafsir konstitusi secara kontekstual guna mengatasi keterbatasan konstitusi yang tidak dapat menjangkau perubahan kehidupan masyarakat yang begitu cepat.

(2) Melalui penafsiran non sistematis; hakim MK memaknai UUD NRI Tahun 1945 sebagai suatu realitas dalam kehidupan masyarakat yang penuh tantangan problematikanya, sehingga nilai-nilai konsitusi tidak tercabut dari realitas sosial. Apabila ada suatu ketentuan hukum yang mencabut nilai-nilai konstitusi dari realitas sosial maka MK wajib membatalkannya.

(3) Melalui penafsiran futuristik; hakim MK memproyeksikan perkembangan UUD NRI Tahun 1945 ke arah masa depan, yakni mengantisipasi perubahan kehidupan masyarakat pada waktu mendatang, sehingga penegakan konsitusi pada masa

mendatang harus tetap berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*).²² Mengenai keadilan, Thomas Aquinas, menegaskan bahwa esensi hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Bismar Siregar, mantan Hakim Agung, yang menyatakan bahwa hakim wajib menafsir undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.²³ Menurutnya “keadilan jauh lebih penting daripada kepastian undang-undang, jadi carilah makna dari suatu undang-undang, lebih daripada prosedur hukum.”²⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka hakim MK boleh saja menggunakan pendekatan penemuan hukum dalam memutus pengujian undang-undang, meski mengandung *ultra petita*. Menurut Jimly Asshiddiqie, putusan MK itu bisa *ultra petit* dengan syarat, yakni jika pasal yang dimohonkan terkait pasal-pasal lain (jantung dari Undang-Undang).

²² Pendapat ahli HTN ini dikemukakan dalam berita yang berjudul “Hakim Boleh Memutus di luar Permohonan,” Suara Karya, 12 Januari 2007

²³ Bambang Sutiyoso, 2012, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, hal. 17

²⁴ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang, hal. 5-6

Selain itu, putusan yang *ultra petita* dapat digunakan secara limitatif, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:²⁵

a) Jika peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkara sama atau mirip dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus tersebut;

b) Jika peraturan memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan pada perkara yang ditangani;

c) Jika peraturannya juga ada, tetapi peraturan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat, sehingga hakim wajib menyesuaikan dengan perkara yang sedang ditangani

2. Putusan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pengujian konstitusionalitas Perpu oleh MK merupakan fenomena perkembangan hukum tata negara, karena di dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak diatur satu pun pasal mengenai kewenangan MK untuk menguji konstitusionalitas Perpu. Akan tetapi, MK telah melakukan terobosan hukum dengan cara menggunakan penemuan hukum dalam menguji konstitusionalitas Perpu. Salah satu contoh adalah putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dalam perkara Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana.

Pengajuan permohonan pengujian Perpu tersebut dilakukan oleh 13 (tiga belas) orang yang berprofesi sebagai advokat. Alasan mengajukan permohonan pengujian Perpu²⁶ karena Perpu tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945²⁷. Akibatnya bahwa Perpu tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional para advokat. Selanjutnya, beberapa dalil yang diajukan oleh para advokat diantaranya dampak dengan dikeluarkannya Perpu tersebut dinilai bahwa Presiden mengintervensi lembaga KPK yang bersifat independen dari pengaruh kekuasaan manapun. Selain itu, tindakan Presiden dengan mengeluarkan Perpu dapat menjadi preseden buruk dan dapat membahayakan negara, karena akan berpotensi begitu mudahnya Presiden mengeluarkan Perpu lainnya seperti misalnya Perpu organisasi

²⁶ Diajukan permohonan pengujian Perpu pada Oktober 2009

²⁷ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

²⁵ Munafrizal, 2012, *Op.cit*, hal. 16

advokat, Perpu Pembredelan pers atau Perpu membubarkan Mahkamah Konstitusi karena putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Presiden. Oleh karena itu, menurut para advokat, Perpu Nomor 4 Tahun 2009 dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*), serta telah melanggar asas kepastian hukum dan merusak sistem hukum.

Selanjutnya MK menyampaikan pendapatnya tentang Perpu yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945²⁸, antara lain sebagai berikut: UUD membedakan antara Perpu dan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang tujuannya adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Karena Perpu diatur dalam BAB tentang DPR, sedangkan DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang sehingga materi Perpu seharusnya adalah materi yang menurut UUD diatur dengan undang-undang dan

bukan materi yang melaksanakan undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan materi Perpu juga materi UUD. Apabila terjadi kekosongan undang-undang karena adanya berbagai hal sehingga materi undang-undang tersebut belum diproses untuk menjadi undang-undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan undang-undang, namun terjadi situasi dan kondisi yang mendesak yang membutuhkan aturan hukum untuk segera digunakan guna mengatasi sesuatu hal yang terjadi maka Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menyediakan pranata khusus dengan kewenangan kepada Presiden untuk membuat Perpu.

Pada dasarnya Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru dapat menimbulkan: (a) status hukum baru; (b) hubungan hukum baru; dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu. Akan tetapi, sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-

²⁸ Ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 berisikan:

1. Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
2. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan kegentingan yang memaksa;
3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya;

undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR.

Sehubungan dengan keabsahan kewenangan MK dalam melakukan pengujian konstiusionalitas Perpu, pada hakikatnya didasarkan pada teori penemuan hukum berupa penafsiran hukum. Menurut Moh Mahfud MD, jika dirunut dari *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatika, dan logika hukum, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UUD 1945. Sebab menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 MK hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalimat dalam Pasal 24C ayat (1) tersebut sangat jelas hanya menyebut Undang-Undang dan tidak menyebut Perpu. Seandainya MK diperbolehkan menguji Perpu tentu UUD menyebut secara eksplisit pembolean tersebut, sebab secara formal UUD 1945 membedakan dan menempatkan secara berbeda penyebutan atau pengaturan antara

UU dan Perpu. Undang-Undang diatur dalam Pasal 20, sedangkan Perpu diatur dalam Pasal 22.²⁹

Selanjutnya dijelaskannya pula bahwa kajian-kajian akademik yang pernah berkembang di kampus-kampus pada tahun 2000-2001 menyebutkan antara lain, bahwa pengujian Perpu oleh lembaga yudisial atau lembaga lain seperti yang pernah diberikan kepada MPR oleh Tap MPR No. III/MPR/2000 merupakan “perampasan” atas hak dan kewenangan konstiusionalitas DPR yang diberikan oleh UUD 1945. Sebab sudah sangat jelas, Pasal 22 UUD 1945 memberi hak kepada DPR untuk menilai sebuah Perpu pada persidangan berikutnya, apakah Perpu itu akan disetujui sebagai Undang-Undang atautkah tidak. Kesamaan level isi antara Undang-Undang dan Perpu tetap tidak dapat dijadikan alasan bagi lembaga selain DPR untuk menguji konstiusionalitas Perpu terhadap UUD 1945; apalagi kalau kesamaan isi itu hanya karena Perpu diartikan sebagai “undang-undang dalam arti materiil”, sebab di dalam hukum tata negara semua jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD sampai Peraturan Desa, adalah undang-undang dalam arti materiil.

²⁹ Moh Mahfud MD menyampaikan pendapatnya sewaktu menjabat sebagai hakim MK dalam menangani perkara pengujian konstiusionalitas Perpu Nomor 138/PUU-VII/2009

Pada akhirnya Moh Mahfud MD menegaskan bahwa dalam perkembangan pengujian Perpu perlu penafsiran atas isi UUD NRI Tahun 1945 yang tidak hanya bertumpu pada *original intent*, tafsir historik, dan tafsir gramatika melainkan harus menekankan pada tafsiran sosiologis atau teleologis. Penekanan pilihan atas penafsiran yang demikian dilakukan untuk melindungi kepentingan *original intent* pasal-pasal dan prinsip-prinsip lain yang juga ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Pilihan penafsiran tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip dalam menjaga tegaknya konstitusi yakni tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diuji melalui pengujian yudisial.

Menurut penulis, penggunaan tafsiran hukum tetap penting untuk keabsahan kewenangan MK dalam menguji konsitusionalitas Perpu. Untuk itu, selain penafsiran sosiologis atau teleologis yang digunakan, juga perlu menggunakan penafsiran heuristik. Ketiga penafsiran hukum tersebut dapat menjembatani hubungan konstitusi dan masyarakat, artinya nilai-nilai konstitusi dapat melindungi kepentingan masyarakat seperti nilai HAM, dan sebagainya. Berikut ini penjelasannya:

(1) Melalui penafsiran sosiologis atau teleologis, hakim MK menegaskan arti penting konstitusi bagi masyarakat, yakni menjamin kepentingan masyarakat baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Ketika kepentingan masyarakat itu dilanggar oleh suatu ketentuan hukum tertentu seperti Perpu, maka menjadi kewajiban MK untuk membatalkannya. Jika dihubungkan dengan mazhab *Sociological Jurisprudence* (Jhering, Roscoe Pound), antara hukum (konstitusi) dan masyarakat mempunyai hubungan interaksi, artinya sejauhmana konstitusi memengaruhi kehidupan masyarakat, sangat tergantung pada sejauhmana konstitusi melindungi kepentingan masyarakat. Jika konstitusi tidak dapat melindungi kepentingan masyarakat sudah tentu akan berdampak pada ketidaklestarian dan ketidaklanggahan konstitusi dalam masyarakat.

(2) Melalui penafsiran heuristik, hakim MK mengakomodir kebutuhan sosial dan psikologi masyarakat. Ketika hakim MK melakukan pengujian konsitusionalitas Perpu, maka hakim MK mengakomodir kebutuhan sosial dan psikologi masyarakat yakni nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga nilai tersebut masing-masing bersandar pada doktrin filosofis, yuridis, dan historis – sosiologis mengenai

validitas hukum. Sehubungan dengan ketiga nilai tersebut, Sudikno Mertokusumo³⁰ menegaskan bahwa masing-masing nilai memiliki posisi yang telah permanen dalam suatu konstruksi hukum. Kepastian hukum terletak pada pasal perundang-undangan, kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*). Akibat penggunaan teori penemuan hukum maka MK berwenang secara sah menguji konstitusionalitas, dan dengan teori penemuan hukum sekaligus juga diproyeksikan bahwa penegakan konstitusi oleh MK pada waktu mendatang sangat bertumpu pada nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

C. PENUTUP

a. Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang telah melakukan langkah progresif yakni menggunakan pendekatan teori penemuan hukum berupa penafsiran hukum. Melalui penafsiran konteks, hakim MK memahami konstitusi secara tersirat dan bukannya secara lahiriah. Artinya ada makna yang

terkandung di dalam konstitusi yang harus digali oleh hakim MK. Oleh karena itu, konstitusi tidak bisa semata-mata dimaknai secara tekstual, mengingat keterbatasan konstitusi yang tidak dapat menjangkau perubahan kehidupan masyarakat yang begitu cepat, sehingga harus ditafsirkan secara kontekstual. Selanjutnya, penafsiran non sistematis, hakim MK memaknai UUD NRI Tahun 1945 sebagai suatu realitas dalam kehidupan masyarakat yang penuh tantangan problematikanya, sehingga nilai-nilai konstitusi tidak tercabut dari realitas sosial. Pada akhirnya, melalui penafsiran futuristik, hakim MK memproyeksikan perkembangan UUD NRI Tahun 1945 ke arah masa depan, yakni mengantisipasi perubahan kehidupan masyarakat pada waktu mendatang, sehingga penegakan konstitusi pada masa mendatang harus tetap berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*).

b. Keabsahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang didasarkan pada teori penemuan hukum berupa penafsiran hukum. Melalui penafsiran sosiologis atau teleologis, hakim MK memberi arti penting konstitusi bagi masyarakat, yaitu nilai-nilai konstitusi yang menjamin kepentingan masyarakat, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya,

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 23

dan sebagainya. Ketika kepentingan masyarakat itu dilanggar oleh suatu ketentuan hukum tertentu seperti Perpu, maka MK wajib membatalkannya. Selain itu, melalui penafsiran heuristik, hakim MK mengakomodir kebutuhan sosial dan psikologi masyarakat. Ketika hakim MK melakukan pengujian konstiusionalitas Perpu, maka hakim MK mengakomodir kebutuhan sosial dan psikologi masyarakat yakni nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

c. Penggunaan teori penemuan hukum mengakibatkan konstitusi dapat ditegakan secara efektif, artinya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diuji melalui pengujian yudisial. Selain itu, penegakan konsititusi dapat menjamin nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan untuk masa kini dan pada waktu mendatang

REFERENSI

Buku

- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang: Yogyakarta
- Manan, Munafrizal. 2012. *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*. Mandar Maju: Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Mandar Maju: Jakarta

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty: Yogyakarta

_____. 2011. *Teori Hukum*. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta

Monteiro, M. Josef. 2013. *Catatan Hukum Kekuasaan versus Supremasi Hukum*. Deepublish: Yogyakarta

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.

Sutiyoso, Bambang. 2012. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press: Yogyakarta

Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. RajaGrafindo Persada: Jakarta

Artikel

Hudiata, Edi. "Jaminan UU No.38 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bagi Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum Untuk Menghasilkan Putusan yang Ideal",

Majalah Hukum Varia Peradilan,
Tahun XXIX No. 344 Juli 2014.

Khamimudin. “Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VII/2012 tentang Hubungan Perdata
Anak Luar Kawin dengan Ayahnya”,
Majalah Hukum Varia Peradilan
Tahun XXVIII No. 331, Juni 2013

Manan, Bagir. “Hakim dan Prospek
Hukum,” *Majalah Hukum Varia
Peradilan* Tahun XXIX No. 343 Juni
2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana.

Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://www.hukumonline.com>

<https://katadata.com>

Surat Kabar

Kompas, 22 Desember 2006

Kompas, 5 Februari 2007

Kompas, 26 Mei 2014

Suara Karya, 12 Januari 2007

Lain-lain

Atmadja, Gde, I Dewa. 1996. Penafsiran
Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi
Hukum, Pidato Pengenalan Jabatan Guru
Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas
Hukum Universitas Udayana, 10 April
1996

Husen, Abdurrahman. 2013. *Penemuan
Hukum*, Bahan Kuliah S2 Program
Magister Ilmu Hukum Universitas
Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Mahyuni. 2013. *Penemuan Hukum
(Rechtsvinding)*, Bahan Kuliah S2
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Lambung Mangkurat,
Banjarasin.